

MODAL SOSIAL JOKOWI DENGAN POLITIK KEKERABATAN: STUDI KASUS PILKADA 2020 DI SURAKARTA DAN MEDAN

Ardi Rusman^{1*}, Al Rafni², Suryanef³

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: ardirusman19@gmail.com

Abstract.

Kinship politics is a new phenomenon in the grand democratic event of Simultaneous Local Elections in 270 regions in Indonesia, even with a trend that is quite significant when reflected in the 2015 simultaneous regional elections. In particular, this article discusses how social capital has a very important role in kinship politics. Kinship politics that occurred in the 2020 Pilkada involved Jokowi's family, namely Gibran in Surakarta and Bobby in Medan. This paper is important to discuss because this topic has a contribution to academic discussion. Some observers judge their victory because of Joko Widodo's high electability so that the popularity of this character is a strong capital to win the competition. The writing of this article uses a qualitative method with supporting literature studies according to the topic. The results of the data analysis show that the trend of kinship politics with social capital is a logical implication of the dysfunction of political parties and the strong pragmatism of political parties in winning electoral contests. The main character of self-perpetuated power and the impact of "name recognition" or "brand name advantage" of political parties and a permissive voting public are also believed to have contributed significantly to kinship politics. In other words, the role of Jokowi's social capital greatly influenced Gibran and Bobby's victory in the 2020 Pilkada. Both of them can be said to have taken advantage of the popularity of Jokowi's big name as President of the Republic of Indonesia. Social capital on the popularity of big family names can be a force to win political competitions.

Keywords: Jokowi Family; Social Capital; Pilkada; Kinship Politics

1. PENDAHULUAN

Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah berlangsung ditengah masa pandemi COVID-19. Meski begitu, dalam kontestasi yang diikuti oleh 270 daerah masih ditemui kandidat yang terlibat dalam politik kekerabatan. Artinya, meski demokratisasi telah terlembaga dengan baik akan tetapi, tetapi saja diciderai oleh politik kekerabatan di aras lokal (Mariana & Husin, 2017). Tulisan ini fokus pada bagaimana modal sosial yang dimiliki Jokowi mampu memenangkan Pilkada 2020. Modal sosial tersebut mengarah pada politik kekerabatan yang terjadi di keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan studi kasus Pilkada di Kota Surakarta dan Medan tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun pengetahuan politik kekerabatan kontemporer di Indonesia. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena adakarakteristik yang unik atau khas dari kasus tersebut, yaitu Gibran dan Bobby yang merupakan putra danmenantu Presiden. Praktik politik kekerabatan masa kini melahirkan perbincangan yang menarik dalam arena perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dianggap sebagai akibat dari rapuhnya badan kepartaian dan aktualisasi peran dan tugas partai politik. Kondisi ini mengakibatkan tendensi mengokohkan politik kekerabatan yang kelihatannya menjadi jalur cepat bagi

partai politik untuk memuluskan kompetisi politik maupun menjamin keberadaan sebuah rezim politik tertentu (Harjanto, 2011: 138).

Argumen utama yang dibangun dalam studi ini adalah tren politik kekerabatan yang menunjukkan tren peningkatan pada Pilkada Serentak 2020 di Indonesia dengan berbagai variannya baik intra- maupun inter-generational, merupakan implikasi logis dari berbagai kondisi yakni disfungsi partai politik dalam proses kaderisasi dan rekrutmen yang efektif serta kuatnya pragmatisme partai dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral. Selain itu, meningkatnya prevalensi dinasti politik juga merupakan konsekuensi logis dari karakter kekuasaan yang self-perpetuated dan dampak dari “name recognition” atau “brand name advantage” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif. Sistem Pilkada yang candidate centered dan ketiadaan regulasi yang dapat memitigasi praktek politik kekerabatan ini juga telah menjadi penyebab lain meningkatnya tren politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020.

Penulis bersepakat dengan analisis banyak ahli bahwa praktek politik kekerabatan potensial untuk dapat mengakibatkan proses demokratisasi di Indonesia gagal memfasilitasi potential benefits yang dijanjikan, jika tidak ada upaya memitigasinya. Dalam historiografi politik Indonesia, siapapun yang berkuasa tentu akan dapat mewariskan tampuk kekuasaan kepada keluarganya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di era demokrasi saat ini, akan tetapi telah terjadi pada era orde baru. Meski demikian di era demokrasi seperti saat ini, tentu tidak lagi dapat dibenarkan penerapan politik kekerabatan yang seringkali menutupi rekam jejak sang kandidat. Sebab setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memajukan diri menjadi kandidat politik dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Dengan kata lain, bila kemudian politik kekerabatan marak terjadi, maka secara otomatis akan menutup peluang kandidat dari luar untuk dapat berkontestasi dengan baik. Konsolidasi politik kekerabatan ini terlihat pada Pilkada tahun 2020. Kasus yang paling menjadi sorotan media dan masyarakat adalah politik kekerabatan yang terjadi di Kota Surakarta dan Medan. Di dua kota tersebut, partai penguasa mengangkat kadernya dari keluarga presiden. Pada awalnya, kehadiran keluarga Joko Widodo di ajang politik nasional dipercaya dapat memutuskan aliran politik kekerabatan di Indonesia. Tetapi nyatanya, anggota keluarga Jokowi berkeinginan maju dalam Pilkada 2020. Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta dan Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan.

Umumnya, sistem kekerabatan secara patrilineal menjadi jaringan kekerabatan yang mendominasi kekuasaan di Indonesia. Bahkan dari sistem feodalisme hingga era reformasi, pengaruh kekerabatan patrilineal sangat dominan. Solidaritas kekerabatan melalui jalur patrilineal diidentikkan dengan marga atau nama keluarga besar, misalkan dalam kasus di Sulawesi ada nama keluarga Yasin Limpo, Qahar Muzakar, dan Nurdin Halid (Purwaningsih, 2015). Modal sosial dalam dinasti kekuasaan di Indonesia, biasanya memanfaatkan jaringan kekerabatannya. Studi yang dilakukan Putri (2018) membahas tentang jaringan kekerabatan matrilineal yang dimanfaatkan sebagai strategi perolehan suara yang berasal dari jaringan keluarga besar. Namun demikian, jaringan kekerabatan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak dapat berinteraksi dengan massa di luar kekerabatannya. Sejarah penguasa Indonesia tidak terlepas dari politik kekerabatan, dari mulai keluarga Soekarno hingga Soeharto. Kali ini dalam politik pemilu 2020, muncul rezim baru yang berasal dari orang nomor satu di Indonesia. Politik kekerabatan Joko Widodo menjadi perbincangan hangat seputar Pilkada 2020. Setelah sebelumnya politik kekerabatan Gusdur yang akan mencalonkan Gus Soleh (adik Gusdur sebagai wakil presiden berpasangan dengan Wiranto) gagal menjadi penerus Gusdur dalam politik kepresidenan. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono yang gagal menembus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Justru, berbeda dengan politik kekerabatan yang diusung keluarga Joko Widodo dengan mengangkat nama Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, keduanya berhasil

meneruskan tren kekuasaan di Surakarta dan Medan. Banyak kalangan menilai kemenangan keduanya karena elektabilitas Joko Widodo yang tinggi sehingga kepopuleran tokoh menjadi modal yang kuat untuk memenangi kompetisi. Kerangka ini membantu penulis untuk melihat jejaring sosial yang mendasari politik kekerabatan Jokowi dan pengaruh jejaring sosial tersebut dalam kemenangan Gibran dan Bobby dalam Pilkada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari berbagai referensi yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

TEORI MODAL SOSIAL

Umumnya, kapital adalah terma yang lazim dimengerti hanya pada arti “kepemilikan ekonomi atau secara material”. Kapital, semata-mata dipahami pada definisi yang terbatas, merujuk pada perihai yang material (seperti uang, komoditi, dan harta benda material lainnya). Francis Fukuyama (2002:22) mendefinisikan modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Jika orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah perusahaan saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya (Fukuyama, 2007: 38).

Michael Wollcock (dalam Dwi Rajibianto, 2010) membedakan tiga tipe modal sosial yaitu sebagai berikut : 1) Sosial Bounding : berupa kultur nilai, kultur persepsi dan tradisi atau adat istiadat. Modal sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan di mana masih berlakunya system kekerabatan dengan system klen yang mewujudkan rasa simpati, berkewajiban, percaya resiprositas dan pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang dipercaya. Tradisi merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi kuat dalam pola perilaku masyarakat mempunyai kekuatan mengikat dengan beban sangsi bagi pelanggarnya. 2) Social Bridging : berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Dapat dilihat pula adanya keterlibatan umum sebagai warga Negara, asosiasi, dan jaringan. 3) Social Linking : berupa hubungan/jaringan sosial dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Abdullah (dalam Suwartiningsih, Sri& Prananingrum, Dyah Hapsari, 2009 :43) mengidentifikasi tiga bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat yaitu:

1. Ideologi dan tradisi lokal yang mengacu pada paham tertentu dalam menyikapi hidup dan menentukan tatanan sosial. Hal ini dapat berupa kepercayaan setempat yang merupakan basis bagi legitimasi tindakan sosial; ajaran yang menjadi sistem acuan dalam tinglah laku yang terwujud; etika sosial yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia atau lingkungan; etos kerja; nilai tradisi; dan norma yang merupakan perangkat aturan tinglah laku.

2. Hubungan dan jaringan sosial yang merupakan pola-pola hubungan antara orang dan ikatan sosial dalam suatu masyarakat seperti kerabat atau ikatan ketetanggaaan.
3. Jaringan terdapat dalam masyarakat, menjangkau institusi lokal yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Ini dapat berupa kelembagaan adat atau pranata sosial yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung.

Dari ketiga bentuk modal social yang ada, dapat disimpulkan bahwa semua bentuk modal sosial berjalan bersama dan saling melengkapi. Konsep modal sosial merujuk pada hubungan sosial, institusi, norma sosial dan saling percaya antara orang atau kelompok lain serta mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas.

TEORI MODAL POLITIK KEKERABATAN

Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka (Andrew Heywood, 2013: 2). Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga, dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi melainkan memanipulasinya menjadi oligarki. Politik kekerabatan menjadi ruang perebutan kekuasaan dan penimbun kekayaan antara para oligarki. (Harjanto, 2011:138).

Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik dinasti memang kerap terjadi dan bahkan terjadi disekitar kita. Jadi arti dari politik kekerabatan itu sendiri adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/ pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan (purwaningsih, 2015:10).

Politik kekerabatan semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik. Menguatnya 16 politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika kecendrungan ini semakin meluas. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karena sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial. Dari konsep Caey, Hess, dan Kurt, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik, keluarga politik, maupun kekerabatan politik, namun skripsi ini menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktifitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik (Harjanto, 2011:152).

MODAL SOSIAL JOKO WIDODO

Kesuksesannya Jokowi di ranah politik karena mempunyai modal sosial. Modal sosial itu bisa dilihat dari jaringan sosial dan politik yang dimiliki oleh Jokowi sebagai seorang politisi. Jaringan sosial dan politik tersebut, di antaranya jaringan dengan partai politik, relawan politik, dan aktivis gerakan sosial, serta pengusaha. Jaringan inilah yang membentuk modal sosial yang dimiliki Jokowi.

Pada tahun 2004, Jokowi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dan pada tahun 2005, Jokowi berkesempatan untuk menjadi Wali Kota Solo dengan dukungan dari partainya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kinerja Jokowi yang bagus dan memuaskan bagi warga Surakarta membuat namanya terpilih kembali menjadi Wali Kota Solo. Nama Jokowi mulai melambung ketika banyak media menceritakan kesuksesan Jokowi di Solo dan kepribadiannya yang sederhana, jujur, dan santun dalam berpolitik. Bahkan, Jokowi mampu menduduki posisi penting di partai PDI-P. Belum genap setahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, lagi-lagi nama Jokowi memenangkan berbagai survei elektabilitas capres Pilpres 2014 hingga akhirnya Jokowi resmi menjadi calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun pada perhelatan Capres, Jokowi harus melawan nama yang sempat mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, Prabowo Subianto. Akhirnya, Jokowi dan Jusuf Kalla berhasil mengalahkan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

Jokowi kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berikutnya di tahun 2019 dengan berpasangan tokoh Nahdhotul Ulama, K.H. Ma'ruf Amin. Pencalonan mereka diusung oleh partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Nadem, PKB, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan PSI. Kesembilan partai ini membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Kerja. Berdasarkan riwayat perjalanan politik Jokowi bisa dilihat bahwa jejaring politik Jokowi sangat meluas. Elektabilitasnya dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menjadi amunisi efektif memenangkan setiap kompetisi. Bergabungnya Jokowi dengan partai politik mampu mengantarkannya sebagai *leader* di kota Surakarta. Tidak hanya itu, beliau memiliki prestasi sehingga didapatkan kepercayaan masyarakat Solo (lokal) hingga kepercayaan di level nasional. Aktivisme politik Jokowi mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Mereka menamakan diri sebagai relawan Jokowi. Relawan-relawan Jokowi membentuk berbagai komunitas, di antaranya Jaman, PIR, BARA JP, ARPAS (Arek Pasar Simbar) Cluring, Komunitas Milineal Banyuwangi, Komunitas Driver Laros Banyuwangi (KDLB), GPKS Muncar, RAS Darussalam, LMDH Sobo Wono-Bumi Harjo Glenmore, KTH Pandowo Mulyo Desa Sumbermulyo, Jamsey, KTH Tambak Agung, LMDH KTH Sumber Makmur Sejahtera, Petani Perhutanan Sosial, REJO Semut Ireng, dan lainnya.

Hadirnya relawan ini memberi kesan bahwa Jokowi mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari level bawah hingga level atas. Fenomena relawan ini memang hadir pada saat Pilkada 2012 DKI Jakarta. Relawan ini mendorong dan mendukung dari mulai pencalonan Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden. Jokowi membawa tren baru dalam aktivitas gerakan sosialnya, yaitu "*blusukan*". *Blusukan* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan aktivitas *blusukan* ini mampu membangun komunikasi dengan masyarakat bawah sehingga memudahkannya dalam bernegosiasi untuk memecahkan masalah. Berbagai program dibuat oleh Jokowi, seperti Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Miskin, dan Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) bagi masyarakat yang tidak memiliki Jamkesmas dan Askes, Bantuan Pendidikan Masyarakat Solo, dan program-program lainnya merupakan agenda yang dianggap pro rakyat.

PENCALONAN GIBRAN

Pengaruh Jokowi menyulap Gibran, bak mahkotapangeran Solo. Kekuasaan birokrasi yang dulu digenggam Jokowi, kali ini akan berlabuh kepada putrasulungnya. Pada awalnya banyak pandangan yang menganggap Gibran tidak cakap mengikuti jejak ayahnya. Hal ini disebabkan karena Gibran tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya, dia dengan adiknya lebih fokus sebagai pengusaha. Keberhasilan Gibran dalam memenangkan Pilkada Surakarta 2020 disebabkan karena beberapa modal sosial. Modal sosial itu yang pertama adalah posisi Gibran yang seorang anak presiden membuat Jokowi

mampu memberikan energi modal sosial yang dimiliki untuk mendukung Gibran.

Melalui kekuatan jejaring sosial Jokowi, Gibran mendapatkan banyak dukungan partai politik. Pengusungan Gibran oleh PDI-P juga disinyalir karena hubungan Jokowi dengan para petinggi partai. Beberapa partai pendukung Gibran, seperti PKB, Gerindra, NasDem, PPP, Golkar, PAN, PSI, dan Perindo. Berawal dari pengusaha dan didukung dengan elektabilitas Jokowi, kelayalitan warga Solo, dan pengaruh kekuasaan politik sang ayah, Gibran menemukan jalan mulus menuju pencalonannya sebagai Wali Kota Surakarta lewat PDI-P. Terkesan ada praktik nepotisme dalam tubuh PDI-P karena yang dipilih adalah anak dari pembesar PDI-P, yang belum pernah berkecimpung di dalam zona politik.

Pendekatan politik yang dilakukan Gibran menjadi penting. *Sowan* atau melakukan pendekatan personal kepada sosok yang dianggap berpengaruh di partai dilakukannya sebagai cara klasik yang masih dipakai. Ada politik tawar-menawar dan lobi di dalamnya sebagai bentuk kedekatan komunikasi dan alat politik untuk mencapai tujuan. Selain itu, ada kekuatan Jokowi yang besar pada rakyat Solo yang sudah dari dulu memiliki kedekatan secara kultural dan politik. Cara pendekatan itulah yang membawa Gibran mampu menegosiasikan visi dan misi politiknya.

PENCALONAN BOBBY

Dinasti politik Jokowi berlanjut hingga ke tanah Batak (Sumatra Utara). Bobby Nasution, menantu dari presiden Jokowi mengikuti jejak kakak iparnya (Gibran) maju dalam pencalonan Wali Kota Medan. Dari sini, terlihat bahwa Jokowi ingin membangun politik paternalistik. Kehadiran keduanya justru menghadirkan kontestasi politik yang berasal dari lingkaran penguasa. Seolah-olah Jokowi sedang membangun penerusnyadi dunia perpolitikan. Berbeda dengan Gibran, Bobby mendapatkan kendaraan politiknya dari Golkar. Namundemikian, Bobby mendapat dukungan dari PDI-P, PSI, PAN, NasDem, Hanura, Gerindra, dan PPP. Delapan partai ini melawan dua partai, yaitu Demokrat dan PKS yang menjadi lawan politik Bobby.

Bobby dinilai bagian dari kerangka konsep politik generasi kedua Joko Widodo. Politik kekerabatan dongkrak elektabilitas Bobby dan mampu membawa elemen kolaborasi partai. Momentum ini tidak disia- siakan oleh Bobby maupun partai pengusung. Tentusaja, di dalamnya ada kontrak politik yang terjalin antara Bobby dan partai pengusung. Jika dilihat secara historis, perolehan suara pemilu presiden pada tahun 2014 dan 2019, suara yang dimiliki Jokowi justru kecil. Inilah yang menjadi tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan Gibran yang secara kultural dan politik jelas-jelas berpihak kepada Jokowi. Karena itulah, dinasti Jokowi dalam pemilihan calon Kepala Daerah menggandeng delapan partai besar untuk bisa memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

Manuver politik lainnya adalah melakukan kontrak politik dengan lembaga non-partai. UMKM adalah salah satu yang menjadi sasaran kontrak politik Bobby. Bobby melakukan pendekatan intensif dengan para pengusaha UMKM terkait ekonomi lokal. Selain itu, Bobby juga melakukan aksi *blusukan* seperti yang dilakukan Gibran. Aksi *blusukan* ini membawa kontrak politik dalam program edukatif dan atasi kemacetan di Kota Medan (VOI, 2020). Bobby harus lebih bekerja keras daripada Gibran karena di Kota Medan elektabilitas Bobby tidak sama kuat dengan Gibran di Solo. Meskipun Bobby merupakan keluarga presiden, status anak mantu belum memberikan jaminan kemenangan. Apalagi kalau dilihat dari peta kekuatan politik, di Medan (khususnya, Medan Utara) lebih banyak golongan Islam Konservatif yang lebih cenderung anti Jokowi.

Pengaruh presiden bisa dikatakan memberikan sumbangsih bagi kepopuleran Bobby. Pembangunan infrastruktur di pulau Sumatra, khususnya di Medan, membuat akseptabilitas Bobby menaik. Kepercayaan masyarakat dan adanya jejaring politik yang dibangun menjadi modal sosial yang kuat bagi Bobby untuk lebih percaya diri maju dalam pentas Pilkada. Kota Medan menjadi sejarah baru bagi Bobby yang dulu lebih populer sebagai pengusaha kopi, kini beralih ke politik. Medan menjadi basis awal membangun karier politiknya, dengan didukung Jokowi *effect* menjadi figur kuat dan telah mengakar bagi kejayaan dinasti politik Jokowi.

Citra yang melekat di dalam figur Bobby sebagai bagian dinasti politik Jokowi menjadi hal yang esensial. Memang tidak ada jaminan kemenangan dengan mengandalkan citra politik penguasa. Tetapi, modal sosial yang didapatkan terbesar sebenarnya adalah nama besar keluarga yang diduplikasinya, sebab jikalau bukan menantu presiden mungkin popularitas Bobby tidak tinggi dan bisa jadi tidak ada peluang baginya dalam pencalonan politik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa modal sosial Jokowi dibangun berdasarkan Konsep kerja yang dikenal dengan “*blusukan*”. Konsep ini yang menjadikan jaringan sosialnya dengan rakyat kecil menjadi kuat. Prestasi kerja yang dimilikinya juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepadanya sehingga meningkatkan status sosialnya. Selain itu, modal kepercayaan dari pemangku kepentingan ekonomi juga didapatkan. Modal-modal inilah yang kemudian menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan arena politik. Politik kekerabatan dianggap sebagai akibat dari rapuhnya badan kepartaian dan aktualisasi peran dan tugas partai politik. Selain itu, meningkatnya prevalensi dinasti politik juga merupakan konsekuensi logis dari karakter kekuasaan yang self-perpetuated dan dampak dari “name recognition” atau “brand name advantage” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif. Modal sosial dalam dinasti kekuasaan di Indonesia, biasanya memanfaatkan jaringan kekerabatannya. Sejarah penguasa Indonesia tidak terlepas dari politik kekerabatan, dari mulai keluarga Soekarno hingga Soeharto. Kali ini dalam politik pemilu 2020, muncul rezim baru yang berasal dari orang nomor satu di Indonesia. Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik.

REFERENSI

- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267–288. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/765>.
- Erwanti, M. O. (2020). Survei Pilkada Medan Indo Barometer: Bobby-Aulia Unggul, 58,3% Rahasia. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5285217/survei-pilkada-medan-indo-barometer-bobby-aulia-unggul-583-rahasia>.
- Harjanto, N. (2011). Analisis CSIS: Politik Kekerabatan di Indonesia. *CSIS*.

- Mahendro, Y. A. (2016). Tindakan Sosial Ekonomi dalam Perspektif New International Sociology. *JISPO*, 6(1), 81–101.
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–11.
- Mariana, D. and Husin, L. H. (2017) ‘Democracy, local election, and political dynasty in Indonesian politics’, *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), pp. 88–97. doi: 10.24198/jwp.v2i2.13998.
- Portes, A. (1998). *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Princeton: Princeton University.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97–123. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>.
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p167-178.2017>.
- Ramadhan. (2019). Keluarga Jokowi-Maruf dan Budaya Politik Kekerabatan. *Asumsi.Co*. <https://asumsi.co/post/keluarga-jokowi-maruf-dan-budaya-politik-kekerabatan>.
- Simanjutak, R. A. (2019). Gibran Rakabuming Sudah Punya Modal Sosial Maju di Pilwalkot Solo. *Sindonews.Com*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1452040/12/gibran-rakabuming-sudah-punya-modal-sosial-maju-di-pilwalkot-solo>.
- Syakra, R. (2013). Modal sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1–22. <http://www.jurnalmasayarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256>.
- VOI. (2020). Tekad Bobby Nasution Jadikan Medan Bersinar. *Voa Indonesia*. <https://voi.id/berita/18978/tekad-bobby-nasution-jadikan-medan-bersinar>.
- Wahyuni, C. (2019). *Pemanfaatan Modal Sosial Deri Asta dan Zohirin Sayuti Pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018*. Padang: Universitas Andalas.
- Wibowo, W. (2014). Kontribusi Brajamusti dalam Pemilu Legislatif. *Studi tentang Kontribusi Kelompok Suporter Sepakbola Brajamusti terhadap Pemenangan Anggota DPRD (Agung Damar Kusumandaru) dalam Pemilu Legislatif di Kota Yogyakarta Tahun 2009*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Wisera, I. G. P. (2014). Modal Sosial, Pemilu Kepala Daerah, Independen 1. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 366–375., 012, 1–8.